

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022**

## **URUSAN SOSIAL**

### **A. Capaian Kinerja Urusan Sosial**

### **B. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

#### 1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a) Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
    - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
    - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    - Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial
- Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
  - Sub kegiatan Penyediaan Sandang
  - Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu
  - Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  - Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - Sub kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
  - Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu identitas anak
  - Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  - Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  - Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
  - Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

- Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
- b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
    - Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
  - d. Program Penanganan Bencana
    - a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
      - Sub kegiatan Penyediaan Makanan
      - Sub kegiatan Penyediaan Sandang
      - Sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
      - Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
      - Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
    - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
      - Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
      - Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
  - e. Program Pemberdayaan Sosial
    - a) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

- b) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sub kegiatan Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
  - a) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - Sub kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - Sub kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

## 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul / Tahun 2022 pada urusan sosial sebagai berikut :

### a. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Indikator program ini adalah cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani dengan target 70% terealisasi 70%. Pagu anggaran sebesar Rp. 8.466.370.445,- terealisasi Rp. 8.401.423.098,- atau 99,23 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS dengan target 70% terealisasi 70%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.8.311.015.365,- terealisasi Rp.8.248.088.722,- atau 99,24 %. Kegiatan ini didukung oleh 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan Penyediaan Permakanan.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.6.663.755.037,- terealisasi Rp.6.648.412.838,- atau 99,77%. Terjadi silva direkening belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan karena jumlah klien yang ada di shelter bersifat insidental. Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan. Program Boga Sehat dilaksanakan di 11 Kapanewon yang terdiri dari 53 Desa, dengan total penerima manfaat sejumlah 900 jiwa. Penerima manfaat kegiatan permakanan yang diakomodir dalam program boga sehat sebanyak 598 jiwa atau 66% adalah perempuan dan 302 jiwa atau 34% lainnya adalah laki-laki. Berdasar dari sebaran penerima manfaat di 11 Kapanewon, penerima manfaat Boga Sehat paling banyak berada di Kapanewon Imogiri dengan jumlah 168 jiwa dan paling sedikit di Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 35 jiwa. Selain 11 Kapanewon yang telah disebutkan di atas, wilayah Kabupaten Bantul masih memiliki 6 Kapanewon lainnya yang belum mendapatkan Program Boga Sehat antara lain ; Kapanewon Kretek, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Srandakan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.153.000.000,- terealisasi Rp.152.816.000,- atau 99,88%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa : pakaian yang tersedia untuk shelter kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti

penerima sandang. Sub Kegiatan ini memiliki 2 (dua) keluaran yaitu pakaian tersedia untuk shelter kesejahteraan sosial sejumlah 450 set, serta penyediaan sandang bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti sejumlah 40 orang. Penerima paket sandang pada tahun 2022 adalah sebanyak 80 orang. Penerima paket sandang merupakan klien PPKS yang menjalani rehabilitasi sementara di Shelter Kesejahteraan Sosial. Paket sandang sendiri sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya terdiri dari pakaian olahraga, pakaian sehari-hari, perlengkapan mandi, alas kaki dan hal-hal pendukung lainnya. Hal ini ditujukan agar klien PPKS Shelter Kesejahteraan Sosial mendapatkan fasilitas dasar secara layak dari sandang, pangan, dan papan.

– Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.14.125.000,- terealisasi Rp.14.125.000,- atau 100%. Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas kurang mampu di wilayah Kabupaten Bantul. Sub Kegiatan ini memiliki 1 (satu) keluaran yaitu pelayanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terdata di luar panti menerima alat bantu sebanyak 5 orang. Capaian kinerja dalam kegiatan ini meliputi layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pembelian kursi roda serta rapat koordinasi terkait penyediaan alat bantu. Pada Tahun 2022, Dinas Sosial masih memiliki stok alat bantu yang juga ditambah dari sisa tahun 2021 sejumlah 77 buah dengan berbagai jenis di antaranya ; kursi roda, *walking aid*, kruk, tongkat kaki tiga, tongkat tuna netra, dan tongkat kaki satu. Selain penyediaan bantuan alat bantu yang diakomodir, pemberian bantuan alat bantu bagi masyarakat juga diakomodir melalui program Jamkesus Terpadu. Pada tahun 2022 Jamkesus Terpadu dilaksanakan 2 kali, yaitu pada bulan Mei dan September yang dilaksanakan di Aula Komplek Pemda II yang dapat diikuti oleh

seluruh masyarakat penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Bantul. Penerima layanan Jamkesmas Terpadu tahun 2022 adalah sebanyak 86 orang, yang terdiri dari 37 perempuan dan 49 laki-laki. Jenis layanan yang diperoleh bervariasi tergantung dari kebutuhan penyandang disabilitas.

– Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.21.575.000,- terealisasi Rp.21.575.000,- atau 100%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga memiliki 1 (satu) keluaran yaitu pelayanan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng direunifikasi dengan keluarga sebanyak 15 orang. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan *Case Conference*/Pembahasan Kasus Perlindungan Anak, razia PMKS Jalanan serta Sosialisasi Adopsi. Pelaksanaan reunifikasi di beberapa kasus dilakukan *case conference* yang akan melibatkan berbagai *stakeholder* dan keluarga PPKS untuk bisa menerima PPKS kembali ke rumah. Selain itu, untuk melakukan pelayanan terhadap PPKS, maka dilakukan razia PPKS yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada keluarga, sehingga bisa dilakukan edukasi kepada PPKS maupun keluarga. Rentang waktu dilakukan reunifikasi PPKS berbeda-beda tergantung pada kondisi PPKS tersebut. Pelayanan reunifikasi yang dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial dilakukan kepada PPKS Penyandang Disabilitas, lebih spesifik yaitu Disabilitas Mental (ODGJ). Data Reunifikasi terbanyak dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas berjumlah 14 orang dengan presentase 41 persen dari total data reunifikasi di tahun 2022, sejumlah 34 orang.

– Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.594.415.080,- terealisasi Rp.589.432.340,- atau 99,16%. Terjadi silva di rekening belanja jasa tenaga keamanan dikarenakan sub rekening premi



asuransi yang digunakan oleh 5 orang hanya diikuti oleh 1 orang. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dimaksudkan untuk memberikan bimbingan dan edukasi kepada klien PPKS. Pemberian edukasi dilakukan melalui beberapa kegiatan di antaranya ; 1) Sosialisasi, 2) *Workshop*, 3) Pemberian Pelatihan Keterampilan bagi PPKS, 4) Pendampingan Forum Pelajar Anti NAPZA (Forlanza), dan 5) Fasilitasi Koordinasi bagi Komisi Daerah Lanjut Usia. Sub Kegiatan ini memiliki 4 (empat) keluaran yaitu; 1) masyarakat diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop sebanyak 400 orang; 2) masyarakat mendapatkan sosialisasi PMKS sebanyak 30 orang; 3) pelayanan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial sebanyak 50 orang; dan 4) Tim TRC melaksanakan evakuasi PMKS selama 12 bulan. Selain yang telah disebutkan di atas, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial juga diberikan kepada klien PPKS yang ada di Shelter Kesejahteraan Sosial. Pemberian bimbingan tersebut disusun dalam sebuah jadwal harian agar klien Shelter Kesejahteraan Sosial memiliki aktivitas-aktivitas produktif. Sub Kegiatan ini juga mengampu terkait pelaksanaan evakuasi oleh TRC Bidang Rehabilitasi Sosial selama tahun 2022 telah melakukan evakuasi sebanyak 133 kali. Setiap bulannya TRC melakukan evakuasi terhadap PPKS sebanyak 8 sampai 17 kali perbulan. Jika dirata-rata, setiap bulannya TRC melakukan 11 kali evakuasi. Pelaksanaan evakuasi dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Bidang Rehabilitasi Sosial. Tujuan evakuasi di antaranya adalah kontrol rutin ke Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan pemberian rujukan ke Balai Pelayanan Sosial.

- Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.2.000.000,- terealisasi Rp.2.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan dan edukasi kepada keluarga dari klien PPKS sebagai wujud upaya bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sub kegiatan ini memiliki 1 (satu) keluaran yaitu bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat sebanyak 5 kasus. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat dengan sasaran sebanyak 50 orang. Hal ini bertujuan agar masyarakat maupun keluarga khususnya keluarga PPKS dapat tereduksi terkait adanya layanan-layanan sosial yang dapat diakses masyarakat melalui Dinas Sosial. Sub kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media penyebarluasan informasi sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu identitas anak.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.78.633.048,- terealisasi Rp.76.681.944,- atau 97,52%. Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu dan memfasilitasi PPKS mendapatkan haknya melalui pembuatan identitas kependudukan. Fasilitasi pembuatan identitas kependudukan berupa NIK, akta kelahiran, surat nikah, Kartu Identitas Anak, dan KK. Sub kegiatan Fasilitasi Adminduk memiliki 1 (satu) keluaran yaitu penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Pemberian layanan fasilitasi adminduk dilaksanakan melalui koordinasi bersama Dinas Dukcapil Bantul, KPAI Kota Yogyakarta, UPTD PPA Bantul, dan pihak pihak terkait lainnya. Layanan tersebut diberikan kepada anak yang mengalami kasus perlakuan salah, penelantaran, dan permasalahan pengasuhan. Seluruh kasus yang ditangani adalah kasus anak yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul.

- Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.78.633.048,- terealisasi Rp.76.681.944,- atau 97,52%. Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada PPKS agar dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar. Sub Kegiatan ini memiliki 1 (satu) keluaran yaitu penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dilayani sebesar 100 persen. Dalam proses adanya laporan masuk terkait penemuan PPKS telantar, langkah pertama adalah memastikan kondisi kesehatan klien. Jika dari hasil analisa sementara klien dirasa memerlukan pelayanan medis maka akan memberikan rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai agar klien mendapatkan perawatan medis terlebih dahulu sebelum nantinya mendapatkan layanan sosial di Shelter Kesejahteraan Sosial. Selain itu dalam kasus anak, juga menjadi penghubung bagi anak yang putus sekolah dan masih dalam usia sekolah untuk diberikan rujukan ke lembaga yang dapat memberikan pendidikan dasar dalam bentuk kejar paket. Klien PPKS Shelter Kesejahteraan Sosial selain mendapatkan tindak lanjut pemulangan ke keluarga maupun dikembalikan ke daerah asal, beberapa klien juga masih dalam proses penyembuhan medis di beberapa Rumah Sakit maupun melanjutkan pelayanan guna memperoleh tambahan keterampilan di beberapa layanan sosial.

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.63.350.000,- terealisasi Rp.63.150.000,- atau 99,68%. Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pelayanan terhadap kegiatan kegiatan yang bersifat darurat untuk melakukan pelayanan penanganan kepada PPKS yang ada di Shelter Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk ; 1) Pemenuhan kebutuhan operasional Shelter Kesejahteraan Sosial, 2) Pemenuhan kebutuhan klien PPKS, 3) Pelatihan penanganan klien PPKS, dan 4) Pemulasaran jenazah terlantar. Sub Kegiatan Pemberian

Layanan Data dan Pengaduan memiliki 3 (tiga) keluaran yaitu: 1) data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu fakir miskin dan rawan miskin sebanyak 20.000 PMKS; 2) jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki sebanyak 3 layanan; dan 3) petugas pendataan yang mengikuti pelatihan pendataan sebanyak 34 orang. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa: Monitoring dan evaluasi program pendataan, pelatihan bagi petugas pendataan, dan rapat koordinasi pendataan PPKS. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pelayanan yang terintegrasi kepada PPKS dengan rincian pendataan pada lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, anak dan balita terlantar, serta gelandangan dan pengemis.

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.502.507.120,- terealisasi Rp.464.365.960,- atau 92,41%. Terjadi silva direkening belanja bahan-bahan lainnya karena jumlah klien di shelter bersifat insidental, sedangkan rekening jasa tenaga kesehatan, dan jasa tenaga penanganan sosial dikarenakan keikutsertaan premi asuransi hanya terbatas. Kegiatan ini bersifat kedaruratan (tidak bisa diprediksi) baik realisasi fisik maupun ralisasi keuangannya. Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat darurat untuk melakukan pelayanan penanganan kepada PPKS yang ada di Shelter Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk; 1). pemenuhan kebutuhan operasional Shelter Kesejahteraan Sosial, 2). pemenuhan kebutuhan klien PPKS, 3) pelatihan penanganan klien PPKS, dan 4) pemulasaran jenazah terlantar. Sub Kegiatan ini memiliki 1 keluaran yaitu operasional Shelter Kesejahteraan Sosial selama 12 bulan. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan dalam pemberian layanan kedaruratan terkait pemberian makan minum klien Shelter Kesejahteraan Sosial pada tahun 2022 terdapat total 80 klien yang tinggal di Shelter Kesejahteraan Sosial dengan durasi waktu tinggal bervariasi, mulai dari yang hanya 1 hari sampai 204 hari. Jika

dijumlahkan secara keseluruhan total jumlah hari dari 80 klien PPKS di Shelter Kesejahteraan Sosial adalah sebanyak 1967 hari di mana setiap harinya mendapatkan fasilitas makan dan minum sebanyak 3 kali. Selain pemberian makan minum bagi klien Shelter Kesejahteraan Sosial maupun biaya operasional lainnya.

– Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.129.272.032,- terealisasi Rp.129.097.696,- atau 99,87%. Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penelusuran keluarga bagi PPKS yang menjadi klien Dinas Sosial dan memiliki 1 (satu) keluaran yaitu penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga sebesar 100 persen. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penjangkauan klien PPKS, pelatihan penanganan PPKS untuk Tim Reaksi Cepat Bidang Rehabilitasi Sosial dan pemberian layanan oleh Pekerja Sosial. Klien PPKS yang dijangkau dalam sub kegiatan ini adalah klien terlantar yang ditemukan kemudian tidak mengetahui alamat pastinya karena tidak memiliki identitas, oleh karena itu dilakukan penelusuran keluarga yang pada awalnya dilakukan asesmen kepada klien jika kondisi klien sudah stabil dan bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik. Kegiatan pada sub ini juga pelatihan penanganan PPKS oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) yang selalu banyak berhubungan dengan PPKS di wilayah Kabupaten Bantul. Dalam kegiatan ini bahwa Pekerja Sosial juga memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada klien PPKS. Pelayanan yang dilakukan adalah berupa asesmen dengan intervensi untuk melakukan penelusuran kepada keluarga klien PPKS di dalam Shelter Kesejahteraan Sosial. Penelusuran keseluruhan sejumlah 29 orang dan penelusuran keluarga PPKS Penyandang Disabilitas tertinggi dibandingkan penelusuran keluarga PPKS yang lain. Proses penelusuran keluarga membutuhkan waktu dalam kegiatan asesmennya karena terkadang PPKS sulit untuk diajak berkomunikasi.

– Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.9.750.000,- terealisasi Rp.9.750.000,- atau 100%. Sub kegiatan ini Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan bagi klien PPKS agar mendapatkan rehabilitas sosial maupun rehabilitasi medis tingkat lanjut yang belum dapat diakomodir oleh Dinas Sosial. Sub kegiatan ini memiliki 2 (dua) keluaran yaitu: 1) koordinasi lintas sektor sebanyak 2 kali; dan 2) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk sebanyak 10 orang. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa : Pengadaan penunjang layanan rujukan, dan rapat koordinasi pemberian layanan rujukan. Pelayanan rujukan sejumlah 34 orang dan didominasi oleh penyandang disabilitas yaitu sebanyak 47 persen dari total keseluruhan PPKS yang mendapatkan layanan rujukan. Rujukan dilakukan kepada PPKS dengan kondisi klien stabil maupun tidak stabil. Sebelum dilakukannya rujukan, maka ada rapat koordinasi terkait dengan PPKS tersebut sesuai dengan kondisinya, sehingga tempat rujukan yang dituju akan sesuai untuk klien PPKS tersebut. Rujukan yang dilakukan adalah dengan mengantarkan klien PPKS menuju ke tempat rujukan tersebut. Tempat rujukan klien PPKS Bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2022 diantaranya : BRSPA Dinas Sosial DIY, BPSTW Kasongan, Sentra Margo Laras di Pati, RSUD Panembahan Senopati, RSJ Ghrasia Yogyakarta, RSJ Prof. Dr. Soerodjo Magelang, Camp Asesmen DIY.

- b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya capaian pelayanan bagi PMKS lainnya dengan target 70% terealisasi 70%.

Pagu anggaran kegiatan ini Rp.155.355.080,- terealisasi Rp.153.334.376,- atau 98,70%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.155.355.080,- terealisasi Rp.153.334.376,- atau 98,70%. Terjadi silva direkening belanja jasa tenaga administrasi dikarenakan keikutsertaan premi asuransi hanya terbatas. Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk pelayanan dan edukasi bagi PPKS sesuai dengan keperluan layanan yang dibutuhkan. Sub Kegiatan ini memiliki 2 (dua) keluaran yaitu: 1) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan sebanyak 100 orang; dan 2) klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi sebanyak 20 orang. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa: Pemberian layanan pemulasaran jenazah terlantar (5 kali), Pelatihan keterampilan bagi disabilitas (1 kali), *Workshop* pelatihan penanganan PMKS (1 kali).

**b. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.**

Indikator program ini adalah Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial dengan target 55% terealisasi 54%. Pagu anggaran sebesar Rp. 6.985.614.091,- terealisasi Rp. 6.943.201.818,- atau 99,39 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS dengan target 100% terealisasi 99,96%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.6.985.614.091,- terealisasi Rp.6.943.201.818,- atau 99,39 %. Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.753.437.596,- terealisasi Rp.750.916.196,- atau 99,67%. silva dikarenakan rek sewa tempat tidak dilakukan karena sosialisasi yang dilakukan di gedung pertemuan pribadi sehingga tidak dikenakan sewa tempat. Pemerintah telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) yang dikelola oleh Pusdatin Kementerian Sosial RI. Data ini berisikan *by name by address* beserta status kesejahteraan rumah tangga yang masuk di dalamnya, yang digunakan sebagai basis data sasaran penerima bantuan perlindungan sosial di Indonesia. Tujuan dari DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang adil dan merata terhadap masyarakat. Hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan sub kegiatan ini yaitu berupa satu laporan pemutakhiran data kemiskinan dan sosial wilayah perkotaan, 240 orang mendapatkan pendampingan pembekalan persiapan pendataan IKS, 75 desa melaksanakan musyawarah desa untuk pendataan, 30 peserta mengikuti sosialisasi Banjamsos.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.581.828.128,- terealisasi Rp.578.418.878,- atau 99,41%. silva dikarenakan rekening tenaga administrasi penyedia jasa (TKPK) mengundurkan diri. Program Pengelolaan Data Fakir Miskin bertujuan untuk memperkuat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di tingkat Puskesmas supaya mampu memberikan pelayanan terbaik dan optimal di tataran kalurahan, karena selama ini pelayanan sering terkendala dengan data yang tidak tersedia dan sarana dan prasarana yang belum memadai. Salah satu wujud hadirnya pemerintah di dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat adalah dengan mendekatkan pelayanan supaya mudah dijangkau oleh masyarakat. Puskesmas-SLRT sebagai *single window service*, berperan sangat strategis sebagai pusat koordinasi dan kerjasama multi pihak untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam pemecahan permasalahan kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Oleh karena itu, pengelolaan multidata di Puskesmas-SLRT harus diperkuat supaya dalam memberikan pelayanan dapat optimal dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hasil yang telah dicapai dalam



pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu berupa satu dokumen laporan pemutakhiran data kemiskinan dan sosial wilayah pedesaan, 200 orang mengikuti pendampingan kegiatan jaminan kesehatan dan bantuan sosial, dan 3000 data verifikasi data penduduk miskin dan rumah tangga miskin.

– Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.3.847.822.955,- terealisasi Rp.3.830.122.532,- atau 99,54%. Terjadi silva direkening belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dikarenakan ketidakhadiran peserta penerima bansos. Salah satu isu yang mendesak dan memerlukan data yang akurat serta terpadu ialah masalah yang berpusat pada isu kemiskinan. Isu kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan upaya memperoleh perkiraan tingkat kemiskinan berdasarkan ukuran garis kemiskinan, tetapi juga terkait data jumlah penduduk/rumah tangga dengan pemeringkatan kesejahteraan sebagai rujukan penetapan sasaran program. Upaya pengurangan tingkat kemiskinan merupakan komitmen utama dan merupakan strategi pemerintah untuk menghasilkan pertumbuhan yang *inclusive*. Sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Program Kemiskinan yang bertujuan untuk memfasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu BLT DBH-CHT, Pendampingan Masyarakat Miskin, Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH, dan Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan. Sub kegiatan ini memiliki capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 82 persen. Memiliki 6 keluaran yaitu laporan pemberian BLT DBH-CHT, laporan pendampingan Masyarakat Miskin, Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH, dan laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan masing-masing 1 dokumen. Selanjutnya, jumlah orang yang mendapatkan bantuan langsung tunai BBM adalah 3800 orang, dan jumlah orang yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai DBH-CHT adalah 1872 orang.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.1.802.525.412,- terealisasi Rp.1.783.744.212,- atau 98,96%. Terjadi silva direkening belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dikarenakan ketidakhadiran peserta penerima bansos. Upaya pengurangan tingkat kemiskinan merupakan komitmen utama dan merupakan strategi pemerintah untuk menghasilkan pertumbuhan yang *inclusive*. Sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Program Kemiskinan yang bertujuan untuk memfasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, yaitu Pendampingan Bantuan Sosial WRSE, Pendampingan KUBE dan PKH Graduasi yang menerima bantuan usaha. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE sebanyak 86 KPM, pendampingan KUBE sebanyak 20 KUBE, dan PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha sebanyak 300 KPM. Sub kegiatan ini memiliki capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 82 persen.

### **c. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

Indikator program ini adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan target 100% terealisasi 80%. Pagu anggaran sebesar Rp. 667.507.095,- terealisasi Rp. 640.690.730 ,- atau 95,98 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial dengan target 100% terealisasi 97%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.324.391.500,- terealisasi Rp.304.711.500 ,- atau 93,93 %. Kegiatan ini didukung oleh 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- Sub kegiatan Penyediaan Makanan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.285.991.500,- terealisasi Rp.266.501.500,- atau 93,19%. Terjadi silva direkening belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang dikarenakan pemasukan kode rekening belanja dipemeliharaan, seharusnya masuk kode rekening accessories.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dengan pemberian jenis bahan makanan sesuai dengan nilai gizi tertentu guna meningkatkan derajat kesehatan dan upaya memberikan kehidupan yang layak bagi korban bencana alam di wilayah Kabupaten Bantul. Sub kegiatan ini menghasilkan 2 keluaran yaitu penyediaan Dapur Umum Bencana berupa 18 jenis bahan dan penyediaan logistik pada KSB berupa 16 jenis bahan. Sub kegiatan ini memiliki capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 82 persen.

- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.12.275.000,- terealisasi Rp.12.235.000,- atau 99,67%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang dengan pemenuhan kebutuhan pakaian layak pakai dalam upaya memberikan kehidupan yang baik dan bermanfaat bagi korban bencana alam di wilayah Kabupaten Bantul. Sub kegiatan ini menghasilkan 2 keluaran yaitu buffer stok bantuan sandang berjumlah 95 pakaian dan Jumlah paket sandang yang diberikan kepada korban bencana adalah 95 pakaian. Sub kegiatan ini memiliki capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 82 persen.

- Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.5.075.000,- terealisasi Rp.5.000.000,- atau 98,52%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa penyediaan tempat penampungan pengungsi dengan dengan berkoordinasi dengan

lintas sektor pelayanan penanggulangan bencana serta aparat desa yang ada di Kabupaten Bantul dalam upaya memberikan kehidupan yang layak, baik dan bermanfaat bagi korban bencana alam di wilayah Kabupaten Bantul. Sub kegiatan ini menghasilkan Sub kegiatan ini memiliki capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 82 persen. Memiliki 1 keluaran yaitu koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian dilakukan oleh 75 desa.

- Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.5.550.000,- terealisasi Rp.5.475.000,- atau 98,65%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan koordinasi lintas sektor yang berupaya memenuhi penyediaan bantuan bagi kelompok rentan dengan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok rentan tersebut. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan berupa 18 jenis bahan. Sub kegiatan ini memiliki capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 82 persen.

- Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.15.500.000,- terealisasi Rp.15.500.000,- atau 100%. Sub kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dukungan sosial kepada korban bencana serta meningkatkan kapasitas TAGANA melalui pendampingan yang dilakukan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial sebanyak 10 korban, dan TAGANA yang mendapatkan Pendampingan adalah 137 orang. Sub kegiatan ini memiliki capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 82 persen. Memiliki 2 keluaran yaitu Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial sebanyak 10 korban, dan TAGANA yang mendapatkan Pendampingan adalah 137 orang.

b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana dengan target 60% terealisasi 58,50%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.343.115.595,- terealisasi Rp.335.979.230 ,- atau 93,93 %. Kegiatan ini didukung oleh 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.113.370.000,- terealisasi Rp.110.545.000,- atau 97,51%. Terjadi silva direkening belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia dikarenakan narsum sosialisasi yang seharusnya digunakan untuk narsum regional eselon II/DPRD akan tetapi yang terlaksana narsum lokal. Penanganan bencana bukan hanya bersifat responsif tapi juga preventif. Peran pemerintah adalah mendorong semua komponen masyarakat di wilayah yang berpotensi maupun rawan bencana untuk memiliki sikap kesiapsiagaan dan mampu mendeteksi dini gejala-gejala atau tanda-tanda akan munculnya bencana. Kesiapsiagaan suatu wilayah tentu saja akan memiliki arti penting dalam rangka meminimalkan korban, baik jiwa maupun materi. Kegiatan pembentukan Kampung Siaga Bencana merupakan salah satu solusi untuk menumbuhkan sikap kesiapsiagaan dan tanggap bencana di wilayah Desa/Kalurahan/Kelurahan. Peran aktif masyarakat dengan pendekatan/metode *Community Base Disaster Management* (CBDM) menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek penanganan bencana. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan sendiri upaya penanganan bencana. Sub kegiatan ini memiliki capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 82 persen. Memiliki 1 keluaran yaitu kecamatan koordinasi kebencanaan berjumlah 17 kecamatan.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.229.745.595,- terealisasi Rp.225.434.230,- atau 98,12%. Terjadi silva direkening belanja jasa

tenaga penanganan bencana dikarenakan adanya penyesuaian verifikasi keanggotaan terbaru. Tagana adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Peningkatan kualitas dan kapasitas anggota TAGANA sangat penting untuk dilaksanakan dalam memaksimalkan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul. Hasil dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kualitas berjumlah 137 Tagana. Sub kegiatan ini memiliki capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 82 persen. Memiliki 1 keluaran yaitu dan Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kualitas berjumlah 137 Tagana.

**d. PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL.**

Indikator program ini adalah Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS dengan target 60% terealisasi 60%. Pagu anggaran sebesar Rp.874.024.259,- terealisasi Rp.873.920.398,- atau 99,99 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang dengan target 5 kelompok terealisasi 5 kelompok.

Pagu anggaran kegiatan ini Rp.12.450.000,- terealisasi Rp.12.450.000,- atau 100 %. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.12.450.000,- terealisasi Rp.12.450.000,- atau 100%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran serta masyarakat sebagai wujud kesadaran dan tanggungjawab sosial serta semangat gotong royong masyarakat yang mengedepankan asas kemanusiaan, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan. Masyarakat memiliki potensi

untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut melalui kegiatan sumbangan. Pengumpulan sumbangan bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan uang atau barang dari masyarakat, menciptakan transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) sesuai peraturan perundang-perundangan. Untuk tertib administrasi dan mengantisipasi dampak negatif PUB dan UGB, dilakukan kegiatan sosialisasi PUB dan UGB.

b) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja dengan target 25% terealisasi 25%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.861.574.259,- terealisasi Rp.861.470.398,- atau 99,99 %. Kegiatan ini didukung oleh 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.31.769.500,- terealisasi Rp.31.769.500,- atau 100%. Indikator sub keg/ouput Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi. Sub kegiatan ini berupa rapat koordinasi dan sosialisasi dan pembinaan kepada para pekerja sosial masyarakat (PSM) agar meningkat kemampuannya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Dengan target 40 % dan terealisasi 40%. Dari pembinaan di ketahui bahwa: Untuk meningkatkan peran PSM dalam penanganan PPKS diperlukan sertifikasi PSM, Data PSM secara keseluruhan se Kabupaten belum terupdate dengan baik, Sinergitas PSM dengan pilar sosial yang lain masih perlu ditingkatkan, Penanganan antar PSM dan antar pilar partisipan kesejahteraan sosial belum terjalin secara sinergitas, dan Motivasi penanganan PSM bagi PPKS masih perlu di tingkatkan. Secara kuantitatif jumlah PSM di Kabupaten Bantul dengan dasar Permensos No. 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, maka data PSM di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 sejumlah 631 orang.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.248.658.550,- terealisasi Rp.248.658.550,- atau 100%. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan mengambil lokasi berpindah pindah, dimulai dari Dinas Sosial Bantul dilanjutkan dari Kecamatan satu ke Kecamatan yang lain. Peserta yang diundang semua TKSK se-Kabupaten Bantul dan pihak pihak terkait yang menjadi mitra kerja TKSK.

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah Hadir</b>
1	Pendopo Kapanewon Bantul	9 Februari 2022	30 Orang
2	Pendopo Kapanewon Imogiri	8 Maret 2022	30 Orang
3	Pendopo Kapanewon Kretek	6 april 2022	30 Orang
4	Pendopo Kapanewon Pundong	18 Mei 2022	30 Orang
5	Pendopo Kapanewon Sanden	15 Juni 2022	30 Orang
6	Pendopo Kapanewon Sedayu	14 Juli 2022	30 Orang
7	Pendopo Kapanewon Kasihan	10 Agustus 2022	30 Orang
8	Pendopo Kapanewon Srandakan	7 September 2022	30 Orang
9	Pendopo Kapanewon Sewon	25 Oktober 2022	30 Orang
10	Pendopo Kapanewon Bantul	22 November 2022	30 Orang

Secara kuantitatif jumlah TKSK di Kabupaten Bantul dengan dasar Permensos No. 28 Tahun 2018 tentang TKSK, maka data TKSK di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 sejumlah 17 Orang.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.225.800.000,- terealisasi Rp.225.798.500,- atau 100%. Dalam rangka peningkatan kemampuan potensi masyarakat dalam ikut menangani maslaha kesejahteraan sosial, dilaksanakan pelatihan SDM Kessos secara rutin. Adapun pelaksanaannya pada :

<b>No</b>	<b>Lokasi Pelatihan</b>	<b>Tanggal Pelatihan</b>	<b>Jumlah Hadir</b>
1	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo,	8 Februari 2022	60 Orang



	Bantul		
2	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	12 Maret 2022	20 Orang
3	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	13 Maret 2022	20 Orang
4	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	14 Maret 2022	20 Orang
5	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	4 Juni 2022	60 Orang
6	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	5 Juni 2022	60 Orang
7	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	17 Juli 2022	60 Orang
8	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	20 Agustus 2022	60 Orang
9	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	14 September 2022	60 Orang
10	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	19 Oktober 2022	60 Orang
11	Padepokan Suluh Sasmito, Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	20 November 2022	60 Orang

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.342.296.209,- terealisasi Rp.342.195.948,- atau 99,97%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: kegiatan pembinaan kepada lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul.

- Pembinaan Karang Taruna

Pembinaan Karang Taruna dilaksanakan dalam rangka menguatkan kelembagaan organisasi Karang Taruna Kalurahan se-Kabupaten Bantul, sehingga Karang Taruna diharapkan lebih meningkat dalam berperan aktif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

- Pembinaan WKSBM.

Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan mengambil lokasi berpindah pindah, dimulai dari WKSBM satu ke WKSBM yang lain. Peserta yang diundang semua WKSBM se-Kabupaten Bantul.

- Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.13.050.000,- terealisasi Rp.13.047.900,- atau 99,98%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Pembinaan pengurus LK3 dilaksanakan dalam rangka menguatkan kelembagaan organisasi LK3, sehingga LK3 diharapkan lebih meningkat kinerja dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan berperan aktif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Bentuk kegiatan lainnya adalah penanganan pelayanan permasalahan sosial keluarga.

**e. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Indikator program ini adalah cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketsetiakawasan sosial dengan target 75% terealisasi 75%. Pagu anggaran sebesar Rp.172.001.330,- terealisasi Rp.172.001.126,- atau 100 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen dengan target 70% terealisasi 70%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.172.001.330,- terealisasi Rp.172.001.126,- atau 100 %. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.11.643.850,- terealisasi Rp.11.643.830,- atau 100%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: mewujudkan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang memerlukan rehabilitasi. tahun 2022 juga dilaksanakan rehabilitasi instalasi saluran air, listrik, dan pengecatan pagar.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.144.786.480,- terealisasi Rp.144.786.296,- atau 100%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Monumen Soeharto, Segoroyoso, Pleret, Monumen Jenderal Sudirman Parangtritis, Kretek, Monumen Brimob Sedayu, dilaksanakan dalam rangka memelihara area taman makam pahlawan dan monumen meliputi : perawatan rumput, perawatan makam, perawatan kebersihan halaman, dan lain-lain. Kegiatan sosialisasi penanaman nilai – nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesadaran kebangsaan, kepeloporan dilaksanakan dalam rangka memupuk semangat jiwa nasionalisme dan meningkatkan generasi muda untuk lebih menghargai terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi NKRI. Kegiatan ini disingkat dengan “Sosialisasi PNK-5” untuk peserta ditujukan kepada siswa/murid SMP di Kabupaten Bantul. Kegiatan dilaksanakan di aula Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional merupakan upaya untuk mengenang, menghayati dan meneladani semangat persatuan dan kesatuan, kegotong royongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia yang secara bahu membahu mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa atas pendudukan kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia oleh tentara Belanda pada tahun 1948. kegiatannya diantaranya adalah :

- Sarasehan Sosial HKSAN sejumlah 150 orang peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

- Pembagian bantuan sosial secara simbolis dari beberapa LKS/LKS mitra Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang diberikan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Pemberian piagam penghargaan kepada pilar-pilar sosial berprestasi tingkat DIY yang mewakili Kabupaten Bantul. Piagam penghargaan tersebut diberikan antara lain kepada:
  - Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Mustika Tama dengan kategori Juara 1 LKS Berperstasi Tingkat DIY.
  - Bapak Sobi selaku PSM Kabupaten Bantul dengan kategori Juara 1 PSM Berprestasi Tingkat DIY.
  - Bapak Sri Hardono selaku TKSK Pleret dengan kategori Juara 3 TKSK Berprestasi Tingkat DIY.
  - WKSBM Ngudi Lestari dengan kategori Peringkat IV WKSBM Berprestasi Tingkat DIY.
  - Karang Taruna "Taruna Bhakti" dengan kategori Peringkat IV Karang Taruna Berprestasi Tingkat DIY.
- Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.15.571.000,- terealisasi Rp.15.571.000,- atau 100%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: melakukan penjagaan dan pengamanan taman makam pahlawan selama 12 bulan ( 1 tahun ).

Realisasi Anggaran dan Silva Tahun 2022 Dinas Sosial

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.991.148	88.991.148	100	0
2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	207.828.250	207.800.750	99,99	27.500
3	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.312.622	32.312.475	99,99	147
<b>II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
4	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.439.058.908	3.996.562.493	90,03	442.496.415
5	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.960.000	132.960.000	100	0
6	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	51.855.000	51.855.000	100	0
7	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	92.213.632	92.213.582	99,99	50
8	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	50.000.000	100	0
9	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	28.000.000	28.000.000	100	0
<b>III Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
10	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.2130.000	12.130.000	100	0
<b>IV Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
11	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.460.921.550	1.172.323.050	80,25	288.598.500

12	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.957.100	37.957.100	100	0
13	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.025.000	6.025.000	100	0
14	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.839.937	210.312.290	95,23	10.527.647
<b>V</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
15	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.775.000	95,50	225.000
16	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.854.000	132.620.309	95,51	6.233.691
17	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.627.200	52.627.200	100	0
18	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.559.166	159.794.366	98,30	2.764.800
<b>VI</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
19	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	489.252.940	462.600.450	94,55	26.652.490
20	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.475.000	62.475.000	100	0
21	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.763.776	138.535.490	99,12	1.228.490
22	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.225.172	50.029.035	99,61	196.137
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>					
	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial</b>				
23	Sub kegiatan Penyediaan Permakanan	6.663.755.037	6.648.412.838	99,77	15.342.199
24	Sub kegiatan Penyediaan Sandang	153.000.000	152.816.000	99,89	184.000
25	Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu	14.125.000	14.125.000	100	0
26	Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	21.575.000	21.575.000	100	0
27	Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	594.415.080	589.432.340	99,16	4.982.740

28	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	2.000.000	2.000.000	100	0
29	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu identitas anak	78.633.048	76.681.944	97,52	1.951.104
30	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	78.633.048	76.681.944	97,52	1.951.104
31	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	63.350.000	63.150.000	99,68	200.000
32	Pemberian Layanan Kedaruratan	502.507.120	464.365.960	92,41	38.141.160
33	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	129.272.032	129.097.696	99,94	174.336
34	Pemberian Layanan Rujukan	9.750.000	9.750.000	100	0
<b>VIII</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				
35	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	155.355.080	153.334.376	100	2.020.704
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					
<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
36	Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	753.437.596	750.916.196	99,67	2.521.400
37	Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	581.828.128	578.418.878	99,41	3.409.250
38	Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.847.822.955	3.830.122.532	99,54	17.700.423
39	Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.802.525.412	1.783.744.212	98,96	18.781.200
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>					
<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>					
40	Sub kegiatan Penyediaan Makanan	285.991.500	266.501.500	93,19	19.490.000
41	Sub kegiatan Penyediaan Sandang	12.275.000	12.235.000	99,67	40.000
42	Sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5.075.000	5.000.000	98,52	75.000
43	Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	5.550.000	5.475.000	98,65	75.000

44	Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	15.500.000	15.500.000	100	0
<b>XI</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				
45	Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	113.370.000	110.545.000	97,51	2.825.000
46	Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	229.745.595	225.434.230	98,12	4.311.365
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					
	<b>Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
47	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12.450.000	12.450.000	100	0
<b>XIII</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				
48	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	31.769.500	31.769.500	100	0
49	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	248.658.550	248.658.550	100	0
50	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	225.800.000	225.798.500	99,99	1.500
51	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	342.296.209	342.195.948	99,97	100.261
52	Sub kegiatan Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	13.050.000	13.047.900	99,98	2.100
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>					



<b>XIV</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				
53	Sub kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11.643.850	11.643.830	99,99	20
54	Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	144.786.480	144.786.296	99,99	184
55	Sub kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	15.571.000	15.571.000	100	0
<b>TOTAL</b>		<b>25.127.367.621</b>	<b>24.214.136.908</b>		<b>913.230.713</b>

### C. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sosial adalah sebagai berikut :

Format Tabel  
Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Sosial

No.	Permasalahan	Solusi
1	Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya.	Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
2	Kurangnya fasilitas tempat pengungsian korban bencana	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan kebencanaan.
3	Banyaknya jumlah PPKS yang memerlukan pelayanan dan penanganan sesuai standar pelayanan minimal.	Kerjasama dengan mitra LKS
4	Penanganan PPKS di Shelter Kesejahteraan Sosial belum terintegrasi dengan pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait	Kerjasama dengan instansi terkait lainnya
5	Jumlah PMKS SPM yang masih banyak	Kerjasama dengan mitra LKS
6	Banyaknya jumlah PPKS yang harus ditangani sesuai SPM	Pengembangan dan pemberdayaan PSKS